

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 12

LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.*

4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*

6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

1 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
2 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
3 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
4 berupa laporan keuangan.

5 **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk
6 uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah,
7 masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak
8 mengikat serta tidak secara terus-menerus.

9 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
10 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
11 tidak perlu dibayar kembali.

12 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
13 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan
14 lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

15 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
16 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
17 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
18 pengaruh entitas bersangkutan.

19 **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada
20 perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya
21 produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
22 masyarakat.

23 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara
24 pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

25 **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama
26 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
27 non operasional dan pos luar biasa.

28 **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset
29 dengan harga jual aset.

30 PERIODE PELAPORAN

31 9. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam
32 setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas
33 berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode
34 yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi
35 sebagai berikut:

- 36 (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
37 (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan
38 catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

39 10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak
40 tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi

pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. *Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.*

12. *Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:*

- (a) *nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*
- (b) *cakupan entitas pelaporan;*
- (c) *periode yang dicakup;*
- (d) *mata uang pelaporan; dan*
- (e) *satuan angka yang digunakan.*

13. *Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:*

- (a) *Pendapatan-LO*
- (b) *Beban*
- (c) *Surplus/Defisit dari operasi*
- (d) *Kegiatan non operasional*
- (e) *Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa*
- (f) *Pos Luar Biasa*
- (g) *Surplus/Defisit-LO*

14. *Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.*

15. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi PSAP 12.A, PSAP 12.B, dan PSAP 12.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (a) **Timbulnya hak atas pendapatan;**
- (b) **Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

26. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

27. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1 28. *Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan*
2 *mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan*
3 *layanan umum.*

4 29. *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas*
5 *pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya*
6 *dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*

7 30. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-*
8 *recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan*
9 *pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang*
10 *sama.*

11 31. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-*
12 *recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya*
13 *dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi*
14 *dan pengembalian tersebut.*

15 **AKUNTANSI BEBAN**

16 32. *Beban diakui pada saat:*

17 (a) *timbulnya kewajiban;*

18 (b) *terjadinya konsumsi aset;*

19 (c) *terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*

20 33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
21 pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
22 negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang
23 belum dibayar pemerintah.

24 34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
25 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
26 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

27 35. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
28 saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
29 bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi
30 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

31 36. *Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu*
32 *pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan*
33 *umum.*

34 37. *Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.*

35 38. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis
36 beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban
37 barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
38 penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi
39 ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang,

1 beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
2 penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3 39. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang
4 dapat dikelompokkan menjadi:

5 (a) Metode garis lurus (*straight line method*);

6 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);

7 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

8 40. **Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau**
9 **kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu**
10 **entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

11 41. **Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang**
12 **terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada**
13 **periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas**
14 **beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan**
15 **penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

16 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

17 42. **Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara**
18 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**

19 43. **Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara**
20 **pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**

21 44. **Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu**
22 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan**
23 **Operasional.**

24 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

25 45. **Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu**
26 **dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**

27 46. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
28 antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
29 kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
30 lainnya.

31 47. **Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional**
32 **dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit**
33 **sebelum pos luar biasa.**

34 POS LUAR BIASA

35 48. **Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam**
36 **Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos**
37 **Luar Biasa.**

49. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

50. *Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

SURPLUS/DEFISIT-LO

51. *Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.*

52. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

53. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.*

54. *Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

55. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.*

56. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:*

- (a) *Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi***
- (b) *Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

57. *Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas*

1 ***Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang***
2 ***relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.***

3 58. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain
4 hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

5 **TANGGAL EFEKTIF**

6 59. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku***
7 ***efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran***
8 ***mulai Tahun Anggaran 2010.***

9 60. ***Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,***
10 ***entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua***
11 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ penurunan	%
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah				
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xx
23					
24	BEBAN				
25	Beban Pegawai				
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx

31	Beban Subsid	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xx
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xx
40					
41	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xx
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xx
49					
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xx
54					
55	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29	xxx	xxx	xxx	xx

	s/d 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xx
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xx
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xxx	xxx	xxx	xx
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	xxx	xxx	xxx	xx
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	xxx	xxx	xxx	xx
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
64	POS LUAR BIASA (62-63)	xxx	xxx	xxx	xx
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	xxx	xxx	xxx	xx

